

**PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
YANG BERORIENTASI PADA PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Eny Haryati
enyharyati@gmail.com

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

ABSTRACT

Local economic development (LED) is an effort to optimize local resources involving government, business, local communities and civil society organizations to develop the economy in a region. Therefore the focus of LED include: increased local content, the involvement of stakeholders in a substantially economy, increase community resilience and economic independence, sustainable development, utilization of development by most local communities, small and medium enterprise development, economic growth achieved inclusively, strengthening capacity and improving the quality of human resources, reduction of disparities between groups of society, across sectors and across regions, reducing the negative impacts of economic activities on the environment. Study based on 4 (four) districts in East Java province is known that: (1) modern industrial sector is not likely to contribute to the gross regional domestic product and are less likely to absorb local labor force, (2) the agricultural sector contribute to the gross regional domestic product significantly and tends to absorb labor, (3) development of investment and/or industrialization should be oriented to the utilization of the potential and/or local resources and/or local labor, (4) to increase the market potential and/or to support the movement of investment and industrialization on the agricultural sector, need to develop the service sector; (4) the height of commitment from policy makers for investment and industrialization policy agenda based on local employment is much more important, (5) a commitment that needs to be realized in a policy of innovative and marketable.

Keywords: local economy, labouring absorption, industrialization, investment.

PENDAHULUAN

Salah satu masalah serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam perjalanan mencapai cita-citanya adalah ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia meskipun sejumlah “jurus” telah diluncurkan dengan maksud menyelesaikan persoalan tersebut. Implikasinya, tingginya tingkat pengangguran

terbuka (TPT) masih menjadi fenomena yang mengemuka, kendati pada tahun-tahun terakhir TPT cenderung mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Data pada Badan Pusat Statistik (BPS, 2009) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2009 mencapai 9,26 juta atau 8,14 persen dari total angkatan kerja. Angka pengangguran itu mengalami penurunan apabila dibandingkan pengangguran Agustus 2008 sebesar 8,39 persen dan Februari 2008 sebesar 8,46 persen. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2009 mencapai 113,74 juta orang, bertambah 1,79 juta orang dibanding Agustus 2008 yang mencapai 111,95 juta orang, sedangkan dibanding Februari 2008 bertambah 2,26 juta. Sementara, penduduk yang bekerja mencapai 104,49 juta orang, bertambah 1,94 juta orang dibanding Agustus 2008, atau bertambah 2,44 juta orang dibanding setahun sebelumnya yang mencapai 102,05 juta orang. Dibandingkan dengan keadaan tahun 2008 hampir seluruh sektor lapangan kerja mengalami peningkatan, kecuali lapangan kerja sektor konstruksi yang justru mengalami penurunan sebanyak 120.000 orang dan sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi yang menurun 60.000 orang. Sektor yang mengalami kenaikan terbesar adalah perdagangan yaitu naik 1,16 juta orang, sektor jasa kemasyarakatan naik 830.000 orang, dan pada sektor pertanian naik sebesar 340.000 orang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2009) juga dapat diketahui bahwa penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan mencapai 28,91 juta orang (27,67 persen), yang memiliki usaha dan dibantu buruh tidak tetap sebesar 21,64 juta orang (20,71 persen) dan memiliki usaha sendiri sejumlah 20,81 juta orang (19,92 persen). Dari segi pendidikan, pekerja dengan pendidikan SD ke bawah mengalami penurunan sebanyak 190.000 orang dalam setahun terakhir (Februari 2008-Februari 2009). Namun jumlahnya masih tetap mendominasi lapangan kerja di Indonesia yaitu 55,43 juta orang (53,05 persen) pada Februari 2009.

Sampai Agustus 2008 jumlah angkatan kerja Jawa Timur mencapai 20,18 juta orang. Jumlah ini meningkat 60,7 ribu orang dibanding dengan Agustus 2007 yang mencapai 20,12 juta orang. Sementara jumlah penduduk Jawa Timur yang bekerja sampai dengan Agustus 2008 mencapai 18,88 juta orang atau bertambah 130,9 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Agustus 2007 sebanyak 18,75 juta orang (Dinas Infokom Jawa Timur, 2008). Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur jumlah pengangguran pada Agustus 2008 sebanyak 1,30 juta orang turun 70,2 ribu orang atau 5,1% dibanding dengan keadaan pada Agustus 2007 sebanyak 1,37 juta orang. Dari jumlah tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebanyak 6,42% atau turun 0,37% dibandingkan dengan kondisi pada 2007 sebanyak 6,79%. Menurut data BPS Jawa Timur (2009), jumlah pekerja perempuan pada Agustus 2008 mencapai 7,499 juta orang atau naik cukup signifikan yakni 232,2 ribu orang dibanding pada 2007 yang hanya 7,267 juta orang. Sedangkan jumlah pekerja laki-laki sampai Agustus 2008 berjumlah 11,382 juta orang atau turun 101,6 ribu orang dibanding Agustus 2007 yakni 11,483 juta orang. Dominasi peningkatan penduduk perempuan yang bekerja dikarenakan semakin terbukanya kesempatan kerja di berbagai sektor yang banyak menampung tenaga kerja

perempuan. Sektor lapangan kerja tersebut, meliputi pertanian, perdagangan, dan jasa. Penurunan pengangguran terbesar adalah laki-laki yakni 61,65 ribu orang, sedangkan penurunan pengangguran perempuan sebanyak 8,54 ribu orang. Peningkatan jumlah pekerja yang lebih tajam dibanding dengan jumlah penurunan pengangguran menyebabkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat. Pada Agustus 2008 angka TPAK mencapai 69,31 sedangkan pada Agustus 2007 TPAK 68,99. Disamping itu, pada Agustus 2008 telah terjadi penurunan jumlah pekerja yang cukup dramatis pada lapangan usaha pertanian. Sampai dengan Agustus 2008, jumlah lapangan kerja di sektor pertanian turun 149,3 ribu orang yakni dari 8,391 juta orang pada 2007 menjadi 8,242 juta orang pada 2008. Sedangkan sektor lapangan kerja pada jasa kemasyarakatan naik dari 2,023 juta pada 2007 menjadi 2,169 juta pada Agustus 2008. Sektor lapangan kerja perdagangan juga naik yakni 3,718 juta pada 2007 naik menjadi 3,775 juta pada Agustus 2008. Tak pelak bila sejumlah besar angkatan kerja di Jawa Timur kemudian memutuskan untuk menjadi pekerja migran di luar negeri sebagai pekerja di sektor informal (Haryati, 2009). Mencermati fenomena yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas dapat diketahui bahwa pengembangan investasi dan industrialisasi memegang peran begitu penting dalam upaya menyelesaikan persoalan pengangguran, khususnya pengangguran lokal. Pada konteks ini peran pendidikan yang berbasis pada keunggulan lokal menjadi begitu penting (Maliki, 2009). Dalam kerangka inilah dipandang perlu melakukan penelitian ini.

Permasalahan penelitian (*research questions*) penelitian ini adalah: “Pengembangan investasi dan industrialisasi yang bagaimanakah yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal di Jawa Timur, meliputi: (1) bagaimanakah kondisi *existing* investasi, industrialisasi dan ketenagakerjaan di lokasi penelitian?; (2) investasi dan industrialisasi di sektor apa sajakah yang perlu dikembangkan agar dapat diorientasikan kepada penyerapan tenaga kerja lokal di lokasi penelitian? (3) faktor-faktor apakah yang diperlukan agar investasi dan industrialisasi yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja lokal di Jawa Timur dapat tercipta secara signifikan? (4) kebijakan strategis apa yang perlu diambil oleh Pemerintah Daerah agar pengembangan investasi dan industrialisasi yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja lokal di Jawa Timur dapat terjadi? Sejumlah pertanyaan penelitian tersebut menjadi “bintang penunjuk jalan” dari penelitian ini”.

RERANGKA TEORETIS

Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Pertumbuhan ekonomi dan keadilan merupakan sesuatu yang amat sulit diwujudkan secara simultan. Upaya untuk mensimultankan dua hal tersebut seringkali ditempuh melalui pengembangan ekonomi lokal (Sobandi, 2003). Pengembangan ekonomi lokal (PEL) bukan hanya retorika baru tetapi mewakili suatu perubahan fundamental pada

aktor dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan ekonomi. PEL pada hakekatnya merupakan proses kemitraan antara pemerintah daerah dengan para *stakeholders* termasuk sektor swasta dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia maupun kelembagaan secara lebih baik melalui pola kemitraan dengan tujuan mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi daerah dan menciptakan pekerjaan baru. Ciri utama pengembangan ekonomi lokal adalah pada titik beratnya kebijakan “*endogenous development*” yaitu mendayagunakan potensi sumber daya manusia, institusional dan fisik setempat. (Blakely dalam Koesworo, 2008).

International Labour Organization (ILO) menyebut PEL adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu; yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, menggunakan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi (International Labour Organization, 2007 dalam Bank Indoneia, 2008). Dengan kata lain PEL adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah. Oleh karenanya fokus PEL meliputi: (1) peningkatan kandungan lokal; (2) pelibatan *stakeholders* secara substansial dalam suatu kemitraan strategis; (3) peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi; (4) pembangunan keberlanjutan; (5) pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal; (6) pengembangan usaha kecil dan menengah; (7) pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif; (8) penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; (9) pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah; (10) pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.

Tujuan dan Sasaran PEL

Tujuan PEL menciptakan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan berkelanjutan serta kesempatan kerja penuh melalui meningkatnya kegiatan investasi di daerah. Pengembangan ekonomi lokal tidak semata menekankan pada aspek ekonomi tetapi lebih kepada pendekatan kemitraan dan kerjasama para pihak baik pemerintah, pengusaha dan organisasi masyarakat lokal. Oleh karena itu seluruh pelaku pembangunan harus terlibat dalam proses diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan dalam kerangka PEL. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa PEL pada hakekatnya lebih mengedepankan kemitraan yang dibangun melalui dialog dan komunikasi diantara para pihak dalam pembangunan ekonomi di daerah secara sinergis dan saling menguntungkan (*win-win solution*) dalam mengembangkan berbagai ide, pandangan, visi, dan kegiatan praktis (*collective action*). Dengan demikian PEL menjadi bagian integral dari upaya pembangunan daerah melalui peningkatan daya saing kolektif, penciptaan peluang-peluang baru, dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yang di dalamnya

terdapat sejumlah besar angkatan kerja yang kompetitif dan berkompeten di bidangnya (Wirjokusumo, 2003).

Dendi, 2007 (dikutip Wardhono, 2008) menegaskan bahwa penekanan pada kemitraan bukan berarti PEL mengabaikan pentingnya kompetisi di daerah maupun kompetisi antar daerah. Justru PEL diselenggarakan dengan suatu kesadaran bahwa, agar stakeholders di daerah mampu memaksimalkan pemanfaatan potensi lokal (*internal resources*) dan peluang-peluang eksternal (*external chances*), perlu upaya kolektif untuk mewujudkan keseimbangan antara persaingan yang sehat dan kerjasama yang saling menguntungkan. Dengan demikian, PEL telah memberikan perspektif dasar yang menekankan pentingnya proses dan keterlibatan para pemangku kepentingan sehingga keberhasilan strategi PEL tidak saja ditentukan oleh apa (*what/object*) yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana (*how/method*) melakukannya. Sejumlah hal berikut menjadi tujuan PEL: (1) terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif; (2) terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara *stakeholder* secara sinergis; (3) terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal; (4) terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan usaha kecil menengah (UKM) secara ekonomis dan berkelanjutan; (4) terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah dan *Product Domestic Regional Bruto*; (5) terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan; (6) terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah; (7) terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Apapun bentuk kebijakan yang diambil, PEL mempunyai satu tujuan, yaitu: meningkatkan jumlah dan variasi peluang kerja yang tersedia untuk penduduk setempat. Dalam mencapai itu, pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat dituntut untuk mengambil inisiatif dan bukan hanya berperan pasif.

Tabel 1
Pergeseran Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal

Komponen	Konsep Lama	Konsep Baru
Lapangan kerja	Lebih banyak perusahaan = lebih banyak lapangan kerja	Perusahaan yang mengembangkan pekerjaan berkualitas yang sesuai untuk penduduk setempat
Basis Pembangunan Aset lokasi	Pembangunan sektor ekonomi	Pembangunan Kelembagaan ekonomi baru
Sumber daya	Keuntungan komparatif berdasarkan aset fisik	Daya saing berdasarkan kualitas lingkungan
	Ketersediaan tenaga kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

Sumber: Blakely, 1989 dalam Wardhono, 2008

Fokus Pengembangan Ekonomi Lokal

Sejalan dengan perkembangan isu kebijakan investasi dan industrialisasi, catatan dari World Bank menyebutkan bahwa fokus dari PEL mengalami pergeseran dalam tiga dekade belakangan ini, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Pergeseran Fokus Pengembangan Ekonomi Lokal

Focus	Tools
1960an – 1980an (public sector only)	
<ul style="list-style-type: none">• Menarik investasi manufaktur dari luar daerah• Menarik investasi asing langsung (<i>foreign direct investment</i>/FDI)• Membangun/investasi prasarana fisik	<ul style="list-style-type: none">• Hibah besar, keringanan pajak, pinjaman bersubsidi bagi investasi manufaktur• Subsidi investasi prasarana fisik• Penekanan biaya produksi dengan teknik seperti buruh murah.
1980an – 1990an (public sector driven)	
<ul style="list-style-type: none">• Melindungi dan menumbuhkan bisnis lokal saat ini• Melanjutkan titik berat pada menarik investor dalam negeri tapi biasanya lebih pada sektor spesifik atau pada area tertentu	<ul style="list-style-type: none">• Pembayaran langsung kepada bisnis• individu-Inkubasi bisnis/ tempat kerja• Bimbingan dan pelatihan kepada UKM• Bantuan teknis• Bantuan <i>start-up</i> usaha• Investasi fisik dan non-fisik
Akhir 1990an – seterusnya (public sector led)	
<ul style="list-style-type: none">• Membuat keseluruhan lingkungan bisnis kondusif• Investasi non-fisik (pengembangan SDM, rasionalisasi peraturan)• Kemitraan pemerintah-swasta• Mendorong investasi sektor swasta ke barang publik• Target tinggi untuk menarik investasi, membangun daya saing lokasi	<ul style="list-style-type: none">• Strategi holistik untuk menyediakan lingkungan bisnis yang kompetitif dan rangsangan bagi pertumbuhan bisnis setempat• <i>Networking</i> dan kerjasama antar komunitas• Memfasilitasi business clusters (kumpulan bisnis yang saling berkaitan)• Pengembangan SDM Menunjang peningkatan kualitas hidup.

World Bank, 2001 dalam Wardhono, 2008

Daya Saing Investasi dan Industrialisasi

Daya saing dapat diukur dengan beberapa kategori indikator. Tiap ukuran mencerminkan insentif penting untuk berinvestasi di daerah tersebut setidaknya ada empat kategori penilaian yang digunakan untuk mengukur daya saing, meliputi: (1) komposisi ekonomi, produktivitas, output dan nilai tambah, serta tingkat investasi asing atau *domestic*; (2) potensi wilayah, yang *non-tradeable* seperti lokasi, prasarana, sumber daya alam, biaya hidup dan bisnis, citra daerah; (3) sumber daya manusia, meliputi kualitas SDM yang mendukung kegiatan ekonomi; (4) kelembagaan, konsistensi kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat yang pro-PEL, serta budaya yang mendukung produktivitas.

Pendekatan Kemitraan Publik-Swasta

Tanpa terwujudnya kemitraan antar pelaku dan para pemangku kepentingan maka mata-rantai kegiatan ekonomi dan kegiatan penunjangnya akan sulit terwujud dan bersinergi. Kemitraan yang efektif dan berfungsi dengan melakukan pemupukan modal sosial (*social capital*) agar tumbuh rasa saling percaya di antara para pelaku dan *stakeholders* merupakan sesuatu yang amat penting. Kemitraan yang dikembangkan tidak hanya antar pelaku ekonomi, tetapi juga antara pelaku ekonomi dengan pemerintah, antar unit/lembaga pemerintahan, dan antar daerah. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya lokal dapat dimobilisasi secara lebih efektif, pada saat yang sama investasi pada bidang yang memberikan manfaat sosio-ekonomi dapat didorong.

Sekurang-kurangnya terdapat tiga pendekatan yang dapat diagendakan sebagai pendekatan publik-swasta dalam pengembangan investasi dan industrialisasi yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja lokal. *Pertama*, pendekatan usaha kecil, pilar utama pendekatan ini adalah penciptaan iklim bisnis yang kondusif termasuk kemudahan-kemudahan dalam perijinan, pemberian insentif yang produktif dan peningkatan akses pengusaha kecil kepada modal dan teknologi tepat guna. Dengan demikian, inovasi dapat dilakukan, investasi swasta dapat ditingkatkan dan lapangan kerja dapat tercipta. *Kedua*, pendekatan regional, yang difokuskan pada upaya meningkatkan efisiensi secara kolektif dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pengungkit yang ada pada daerah-daerah tetangga. Tujuannya adalah agar daerah juga dapat meningkatkan daya saingnya ke level yang lebih tinggi, yakni nasional dan global. Salah satu contoh pendekatan regional yang dilakukan oleh berbagai daerah adalah penggalangan kerjasama antar daerah dalam melakukan kegiatan promosi bersama. *Ketiga*, pendekatan rantai nilai (*value chain*), pendekatan rantai nilai (*value chain*) merupakan respon dan antisipasi atas perkembangan pasar komoditas dan finansial yang semakin mengglobal dan kompetitif sehingga menuntut pelaku bisnis dan pembuat kebijakan berpikir dan bertindak melampaui batas-batas lokal, agar mendapatkan momentum yang tepat untuk memanfaatkan peluang yang ada di luar atau sebaliknya mengantisipasi ancaman-ancaman yang bakal datang dari luar. pendekatan rantai nilai merupakan konsep bisnis yang mengutamakan integrasi dan sinergi dua sumberdaya kunci ekonomi, yaitu ilmu pengetahuan (*knowledge*) dan hubungan-hubungan (*networks*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian terapan, dengan model “Analisis Kondisi *Existing*”. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif (Nasir dalam Haryati, 2007). Hasil analisis kondisi *existing* digambarkan dan dilukiskan secara sistematis berdasar dukungan data yang faktual. Penyajian secara rinci mengenai fenomena yang diteliti merupakan sesuatu yang diutamakan dalam penelitian ini. Output penelitian merupakan rekomendasi bagi penentu kebijakan guna mengambil kebijakan yang berperspektif kepentingan publik.

Fokus Penelitian

Populasi penelitian ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi, industrialisasi dan ketenagakerjaan di Jawa Timur, menyangkut: (1) kebijakan yang berkaitan dengan investasi, industrialisasi dan ketenagakerjaan; (2) Lembaga Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan investasi, industrialisasi dan ketenagakerjaan; (3) publik/masyarakat yang memiliki hubungan langsung dengan investasi, industrialisasi dan ketenagakerjaan; (4) pejabat Pemerintah Daerah terkait. Adapun daerah yang menjadi fokus penelitian ini adalah: (1) Kabupaten Magetan; (2) Kabupaten Bojonegoro; (3) Kabupaten Malang; (4) Kabupaten Bangkalan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian deskriptif, proses pengumpulan data merupakan tahapan penting yang memerlukan kecermatan, ketelitian, dan kerja keras dari peneliti. Terdapat dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yakni: studi kebijakan publik, studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi.

Pertama, studi terhadap kebijakan publik (Grindle, dalam Wardhono, 2008a), meliputi: (1) *Content of Policy* (isi kebijakan), (2) *Context of Policy* (lingkungan dan atau implikasi kebijakan), (3) *administrative of policy* (administrasi dari suatu kebijakan). *Kedua*, Studi Dokumen terhadap data sekunder yang ada di kantor pemerintah daerah, khususnya di lembaga sebagaimana disebutkan dalam sampel di atas. *Ketiga*, wawancara mendalam (Mallo, dalam Haryati, 2007) dengan menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur. Penelitian ini melakukan wawancara/diskusi terhadap para informan, yang dilakukan melalui media *Focused Group Discussion* (FGD) dan wawan muka. Selama penelitian ini berlangsung, FGD diselenggarakan sebanyak 6 kali, yakni dengan perwakilan dari lembaga Pemerintah Daerah di 3 kabupaten yang menjadi sampel penelitian ini. Adapun untuk wawancara mendalam dengan metode wawanmuka (empat mata) dilakukan terhadap 128 informan dari kelompok sampel masyarakat. Wawancara mendalam juga akan dilakukan kepada informan kunci. *Keempat*, observasi: dilakukan terhadap data dan aktivitas yang dapat diamati, baik berupa data/aktivitas umum maupun data/aktivitas khusus yang berkaitan langsung dengan fenomena investasi, industrialisasi

dan ketenagakerjaan di Jawa Timur, khususnya di kabupaten yang menjadi sampel penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Melalui 4 macam teknik pengumpulan data sebagaimana diuraikan di atas diperoleh data dengan kualifikasi berikut: (1) melalui studi kebijakan diperoleh sejumlah data yang berkaitan dengan ketentuan perundangan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi, industrialisasi dan ketenagakerjaan di Jawa Timur; (2) melalui studi dokumen diperoleh data sekunder berupa sejumlah dokumen yang relevan dengan pengembangan investasi, industrialisasi dan ketenagakerjaan di Jawa Timur; (3) melalui wawancara mendalam dalam FGD: diperoleh data primer yang bersumber dari penjelasan peserta FGD atas segala sesuatu yang berkaitan dengan data dan pendapat mereka tentang rencana pengembangan investasi, industrialisasi dan ketenagakerjaan di Jawa Timur; (4) melalui observasi diperoleh data dokumen berupa data kualitatif dan kuantitatif yang berkaitan dengan investasi, industrialisasi dan ketenagakerjaan di Jawa Timur.

Terhadap sejumlah data tersebut, peneliti melakukan analisis kualitatif (Miles, Moleong, dalam Haryati, 2007) yang terdiri tiga alur kegiatan: (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) menarik kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data; adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dan diperoleh dari lapangan. Proses reduksi data berlangsung secara terus-menerus sampai penelitian itu selesai menyusun laporan penelitian. Reduksi data juga merupakan proses menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, serta mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan final yang mencerminkan keadaan dan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan dapat diverifikasi dengan baik.

Penyajian data; adalah penyediaan sekumpulan unit-unit informasi dan atau informasi tersusun (berdasarkan apa yang diperoleh selama penelitian), yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data meliputi: teks naratif, tabel, matriks, grafik, bagan, foto; yang kesemuanya dirancang untuk menyajikan hasil penelitian kedalam bentuk yang padu dan mudah dipahami oleh para pembaca laporan penelitian ini. Menarik kesimpulan dan verifikasi; merupakan bagian terpenting proses analisis; yaitu mencari arti, membuat konfigurasi dan kategori-kategori, mengukur alur sebab akibat, menyusun proposisi-proposisi guna menarik kesimpulan, kemudian diverifikasi, diuji validitasnya melalui sejumlah teknik. Teknik uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini dalam rangka verifikasi adalah triangulasi. Tiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang jalin-menjalin yang terjadi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data; untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Magetan

Ditinjau dari perkembangan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magetan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, didapat kecenderungan bahwa kontribusi sektor industri masih relatif rendah, yakni dengan rata-rata kontribusi 8,14% dan angka rata-rata pertumbuhan sekitar 2,31% per tahun atau berada di urutan keempat setelah sektor pertanian dengan rata-rata kontribusi 36,01% dan angka rata-rata pertumbuhan sekitar -1,65% per tahun, sektor perdagangan dengan rata-rata kontribusi 23,68% dan angka rata-rata pertumbuhan sekitar 2,31% per tahun, dan sektor Jasa lainnya dengan rata-rata kontribusi 18,44% dan angka rata-rata pertumbuhan sekitar 0,03% per tahun, sebagaimana yang tersebut dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3
Perkembangan Peran Sektoral Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Magetan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2006 (dalam Persen)

No	Lapangan Usaha	Tahun			Rata-Rata
		2004	2005	2006	
1	Pertanian	36,70	35,82	35,50	36,01
		0,00	-2,40	-0,89	-1,65
2	Pertambangan	0,60	0,59	0,58	0,59
		0,00	-1,67	-1,69	-1,68
3	Industri	7,93	8,18	8,30	8,14
		0,00	3,15	1,47	2,31
4	Listrik	0,94	0,93	0,91	0,93
		0,00	-1,06	-2,15	-1,61
5	Bangunan	6,25	6,14	6,03	6,14
		0,00	-1,76	-1,79	-1,78
6	Perdagangan	23,09	23,77	24,17	23,68
		0,00	2,94	1,68	2,31
7	Perhubungan	2,06	2,05	2,00	2,04
		0,00	-0,49	-2,44	-1,46
8	Keuangan	4,02	4,05	4,10	4,06
		0,00	0,75	1,23	0,99
9	Jasa dan lainnya	18,41	18,48	18,42	18,44
		0,00	0,38	-0,32	0,03
JUMLAH		100,00	100,01	100,01	100,01

Sumber: Kabupaten Magetan Dalam Angka Tahun 2007 dan 2008

Sektor industri telah diakui oleh banyak pihak sebagai sektor usaha yang potensial untuk meningkatkan PDRB dan/atau pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja dan/atau menyerap tenaga kerja. Sehubungan dengan potensi tersebut, maka adalah sangat bijak bila dalam era Otonomi Daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan secara serius memfasilitasi pengembangan investasi dan Industrialisasi di Kabupaten Magetan. Dalam proses mengembangkan investasi dan industrialisasi yang dimaksud, hendaknya memprioritaskan investasi dan industrialisasi yang berbasis potensi dan/atau sumber daya lokal.

Tabel 4
Perkembangan Kesempatan Kerja di Kabupaten Magetan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2007

No.	Lapangan Usaha	Tahun			Rata-Rata
		2005	2006	2007	
1	Pertanian	289079	278270	278251	281867
		63,15	63,29	63,29	63,24
2	Pertambangan	46	43	44	44
		0,01	0,01	0,01	0,01
3	Industri	37270	35833	35831	36311
		8,14	8,15	8,15	8,15
4	Listrik	593	527	527	549
		0,13	0,12	0,12	0,12
5	Bangunan	13154	12618	12618	12797
		2,87	2,87	2,87	2,87
6	Perdagangan	64172	61774	61770	62572
		14,02	14,05	14,05	14,04
7	Perhubungan	6759	6507	6506	6591
		1,48	1,48	1,48	1,48
8	Keuangan	1827	1758	1758	1781
		0,40	0,40	0,40	0,40
9	Jasa dan lainnya	44846	42346	42341	43178
		9,80	9,63	9,63	9,69
Jumlah		457746	439676	439646	445689
		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Magetan Dalam Angka Tahun 2007 dan 2008

Relatif rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB merupakan indikasi bahwa perkembangan industri di Kabupaten Magetan masih relatif terbatas. Konsekuensi logisnya, kemampuan sektor industri untuk menyerap tenaga kerja juga relatif terbatas. Dalam kurun waktu tahun 2005 sampai 2007 sektor industri hanya mampu menyerap

tenaga kerja sekitar 36.311 orang per tahun atau sekitar 8,15% dari jumlah rata-rata tenaga kerja yang bekerja per tahun, atau berada pada urutan keempat setelah pertanian yang mampu menyerap tenaga kerja sekitar 281.867 orang per tahun atau sekitar 63,24% dari jumlah rata-rata tenaga kerja yang bekerja per tahun, perdagangan yang mampu menyerap tenaga kerja sekitar 62.572 orang per tahun atau sekitar 14,04% dari jumlah rata-rata tenaga kerja yang bekerja per tahun, serta jasa yang mampu menyerap tenaga kerja sekitar 43.178 orang per tahun atau sekitar 9,69% dari jumlah rata-rata tenaga kerja yang bekerja per tahun.

Pengembangan sektor industri yang berbasis sumber daya lokal yang mampu menyerap tenaga kerja lokal terasa semakin penting, mengingat masih banyaknya pencari kerja di Kabupaten Magetan yang belum tertampung oleh peluang kerja. Dalam kurun waktu tahun 2005 sampai 2007 ada sekitar 18.309 orang per tahun yang belum mendapat peluang kerja atau sekitar 81,29% dari jumlah pencari kerja per tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peluang kerja pada sektor formal di Kabupaten Magetan masih sangat terbatas.

Tabel 5
Perkembangan Jumlah Pencari Kerja, Penempatan, dan
Permintaan Tenaga Kerja di Kabupaten Megetan Tahun 2005-2007

No	Uraian	Tahun			Rata-Rata
		2005	2006	2007	
1	Pencari Kerja (PK)*)	21771	22860	22941	22524
		100,00	100,00	100,00	100,00
2	PK yang ditempatkan dan dikirim	1241	2050	1028	1440
		5,70	8,97	4,48	6,39
3	PK yang belum Ditempatkan	20385	12629	21913	18309
		93,63	55,24	95,52	81,29
4	Penghapusan	0	1181	0	394
		0,00	5,17	0,00	1,75
5	Permintaan/Lowongan	1241	2050	1060	1450
		5,70	8,97	4,62	6,44
6	Sisa Lowongan yang belum dipenuhi	0	0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Kabupaten Megetan Dalam Angka Tahun 2007 dan 2008

Kabupaten Bojonegoro

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa sektor industri di Kabupaten Bojonegoro rata-rata kontribusinya hanya 4,82% terhadap PDRB dengan angka rata-rata pertumbuhan sekitar -8,59% per tahun atau berada di urutan kelima setelah sektor pertanian dengan rata-rata kontribusi 30,61% dan angka rata-rata pertumbuhan sekitar -9,54% per tahun, sektor pertambangan dengan rata-rata kontribusi 19,72% dan angka rata-rata pertumbuhan sekitar 361,15% per tahun, sektor perdagangan dengan rata-rata kontribusi 18,46% dan angka rata-rata pertumbuhan sekitar -6,72% per tahun, dan sektor Jasa lainnya dengan rata-rata kontribusi 13,19% dan angka rata-rata pertumbuhan sekitar -8,22% per tahun.

Tabel 6
Perkembangan Peran Sektoral Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Bojonegoro Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008 (dalam Persen)

No.	Lapangan Usaha	Tahun					Rata-Rata
		2004	2005	2006	2007*)	2008**)	
1	Pertanian	37,94	31,87	30,49	27,46	25,29	30,61
		0,00	-16,00	-4,33	-9,94	-7,90	-9,54
2	Pertambangan	1,19	17,62	21,35	27,05	31,39	19,72
		0,00	1380,67	21,17	26,70	16,04	361,15
3	Industri	5,98	4,97	4,62	4,37	4,15	4,82
		0,00	-16,89	-7,04	-5,41	-5,03	-8,59
4	Listrik	0,86	0,74	0,71	0,69	0,64	0,73
		0,00	-13,95	-4,05	-2,82	-7,25	-7,02
5	Bangunan	3,51	3,33	3,31	3,16	3,01	3,26
		0,00	-5,13	-0,60	-4,53	-4,75	-3,75
6	Perdagangan	21,74	18,73	18,12	17,31	16,39	18,46
		0,00	-13,85	-3,26	-4,47	-5,31	-6,72
7	Perhubungan	5,28	4,43	4,12	3,87	3,57	4,25
		0,00	-16,10	-7,00	-6,07	-7,75	-9,23
8	Keuangan	5,27	4,60	4,40	4,26	4,16	4,54
		0,00	-12,71	-4,35	-3,18	-2,35	-5,65
9	Jasa dan lainnya	16,14	13,71	12,88	11,83	11,40	13,19
		0,00	-15,06	-6,05	-8,15	-3,63	-8,22
Jumlah		97,91	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber: Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka Tahun 2007, 2008 dan 2009

Ada indikasi bahwa tingginya pertumbuhan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bojonegoro, adalah merupakan konsekuensi logis atau dampak langsung dari keberadaan aliran sungai Bengawan Solo di wilayah Bojonegoro, dan tingginya kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, adalah konsekuensi logis atau dampak langsung dari berkembangnya pertambangan Minyak Bumi di Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 7
Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bojonegoro
Menurut Sektor Usaha Tahun 2006-2008

No	Lapangan Usaha	Tahun						Rata-Rata	
		2006		2007		2008		P	TK
		P	TK	P	TK	P	TK		
1	Pertanian	6	3828	6	3828	5	3311	6	3656
		0,94	13,96	0,87	13,85	0,78	23,28	0,86	15,83
2	Pertambangan	10	783	10	793	9	731	10	769
		1,57	2,85	1,45	2,87	1,40	5,14	1,47	3,33
3	Industri	371	17814	371	17814	347	5640	363	13756
		58,15	64,95	53,61	64,46	53,97	39,66	55,20	59,56
4	Listrik	19	613	19	631	17	585	18	610
		2,98	2,24	2,75	2,28	2,64	4,11	2,79	2,64
5	Bangunan	7	79	7	79	6	70	7	76
		1,10	0,29	1,01	0,29	0,93	0,49	1,01	0,33
6	Perdagangan	19	974	69	974	64	823	51	924
		2,98	3,55	9,97	3,52	9,95	5,79	7,70	4,00
7	Perhubungan	24	1400	24	1400	22	1250	23	1350
		3,76	5,10	3,47	5,07	3,42	8,79	3,55	5,85
8	Keuangan	23	993	24	1000	22	843	23	945
		3,61	3,62	3,47	3,62	3,42	5,93	3,50	4,09
9	Jasa dll.	159	943	162	1115	151	969	157	1009
		24,92							
		2	3,44	23,41	4,03	23,48	6,81	23,92	4,37
	JUMLAH	638	27427	692	27634	643	14222	658	23094
		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka Tahun 2007, 2008 dan 2009

Selanjutnya kalau kita cermati dari perkembangan jumlah perusahaan di Kabupaten Bojonegoro, menurut tabel 7, dalam kurun waktu tahun 2006 sampai 2008, jumlah perusahaan di Kabupaten Bojonegoro ada sekitar 658 unit usaha per tahun dan mampu

menyerap tenaga kerja sekitar 23.094 per tahun. Jika kita cermati dari jumlah rata-rata perusahaan yang ada di Kabupaten Bojonegoro, perusahaan industri yang jumlahnya paling banyak yakni sekitar 363 unit per tahun dengan jumlah tenaga kerja 13.756 orang, diikuti oleh perusahaan Jasa dan lainnya yakni sekitar 157 unit per tahun dengan jumlah tenaga kerja 1.009 orang, perusahaan perdagangan yakni sekitar 51 unit per tahun dengan tenaga kerja 924 orang, dan seterusnya.

Ditinjau dari jumlah rata-rata penyerapan tenaga kerja, perusahaan atau industrilah yang paling banyak menampung tenaga kerja, yakni menyerap 13.756 orang atau 59,65% dari jumlah rata-rata tenaga kerja yang bekerja, diikuti oleh sektor pertanian yang mampu menyerap tenaga kerja sekitar 3.656 orang atau sekitar 15,83% dari jumlah rata-rata tenaga kerja yang bekerja, sektor perhubungan yang mampu menampung tenaga kerja sekitar 1.350 orang atau sekitar 5,85% dari jumlah rata-rata tenaga kerja yang bekerja, perusahaan jasa dan lainnya yang mampu menampung tenaga kerja sekitar 1.009 orang atau sekitar 4,37% dari jumlah rata-rata tenaga kerja yang bekerja di Kabupaten Bojonegoro.

Oleh banyak pihak sektor industri diakui sebagai sektor usaha yang potensial untuk: meningkatkan PDRB dan/atau pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja dan/atau menyerap tenaga kerja, pernyataan tersebut terbukti untuk kasus Kabupaten Bojonegoro, yang datanya sebagaimana yang tertulis dalam tabel 7. Sehubungan dengan potensi sektor industri tersebut, maka adalah sangat bijak bila dalam era Otonomi Daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro secara serius memotivasi para investor dan memfasilitasi pengembangan investasi dan Industrialisasi di Kabupaten Bojonegoro. Dalam proses mengembangkan investasi dan industrialisasi yang dimaksud, hendaknya memprioritaskan investasi dan industrialisasi yang berbasis potensi sumber daya lokal.

Kabupaten Malang

Ditinjau dari perkembangan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, menurut lapangan usaha dari tahun 2004 sampai 2008, didapat kecenderungan bahwa kontribusi sektor industri sudah relatif tinggi, yakni dengan rata-rata kontribusi 17,31% dan angka rata-rata pertumbuhan sekitar 2,58% per tahun atau berada di urutan ketiga setelah sektor pertanian dengan rata-rata kontribusi 31,45% dan angka rata-rata pertumbuhan sekitar -1,28% per tahun, sektor perdagangan dengan rata-rata kontribusi 23,66% dan angka rata-rata pertumbuhan sekitar 0,62% per tahun, sebagaimana yang tersebut dalam tabel 8.

Di satu sisi kontribusi sektor industri terhadap PDRB semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 2,58% per tahun, dan di sisi yang lain kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB semakin menurun dengan rata-rata rata pertumbuhan -1,28%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Malang banyak yang

beralih mata pencaharian, yakni dari sektor pertanian ke sektor industri yang secara ekonomis lebih menguntungkan. Berkembangnya sektor industri di Kabupaten Malang juga telah mendorong berkembangnya sektor bangunan dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 4,06% per tahun, sektor perdagangan tumbuh sekitar 0,62% per tahun, dan pertambangan tumbuh 2,07% per tahun.

Tabel 8
Perkembangan Peran Sektorial Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008 (dalam Persen)

No.	Lapangan Usaha	Tahun					Rata-Rata
		2004	2005	2006	2007	2008	
1	Pertanian	32,08	31,86	31,44	31,42	30,46	31,45
		0,00	-0,69	-1,32	-0,06	-3,06	-1,28
2	Pertambangan	2,48	2,58	2,63	2,61	2,69	2,60
		0,00	4,03	1,94	-0,76	3,07	2,07
3	Industri	16,60	16,89	17,30	17,37	18,37	17,31
		0,00	1,75	2,43	0,40	5,76	2,58
4	Listrik	1,56	1,58	1,57	1,59	1,55	1,57
		0,00	1,28	-0,63	1,27	-2,52	-0,15
5	Bangunan	1,45	1,49	1,54	1,61	1,70	1,56
		0,00	2,76	3,36	4,55	5,59	4,06
6	Perdagangan	23,38	23,55	23,71	23,71	23,96	23,66
		0,00	0,73	0,68	0,00	1,05	0,62
7	Perhubungan	4,56	4,50	4,48	4,44	4,38	4,47
		0,00	-1,32	-0,44	-0,89	-1,35	-1,00
8	Keuangan	3,88	3,87	3,89	4,02	3,85	3,90
		0,00	-0,26	0,52	3,34	-4,23	-0,16
9	Jasa dan lainnya	14,01	13,68	13,44	13,23	13,04	13,48
		0,00	-2,36	-1,75	-1,56	-1,44	-1,78
JUMLAH		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka Tahun 2007, 2008 dan 2009

Dalam kurun waktu 2006 sampai 2008, kemampuan lima besar lapangan usaha di Kabupaten Malang dalam menyerap tenaga kerja adalah: usaha pertanian mampu menyerap tenaga kerja sekitar 516.408 orang per tahun, usaha perdagangan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 259.407 orang per tahun, usaha industri mampu menyerap tenaga kerja sekitar 200.227 orang per tahun, usaha jasa dan lainnya mampu menyerap tenaga kerja sekitar 193.991 orang per tahun, dan usaha bangunan mampu menyerap

tenaga kerja sekitar 83.870 orang per tahun sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 9
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Malang
Menurut Sektor Usaha 2006-2008

No.	Lapangan Usaha	Tahun			Rata Rata
		2006	2007	2008	
1	Pertanian	430420	606839	511966	516408
		0	40,99	-15,63	12,68
2	Pertambangan	3717	10313	4833	6288
		0	177,45	-53,14	62,16
3	Industri	170375	225630	204677	200227
		0	32,43	-9,29	11,57
4	Listrik	743	4377	1455	2192
		0	489,10	-66,76	211,17
5	Bangunan	106384	59263	85962	83870
		0	-44,29	45,05	0,38
6	Perdagangan	225629	251955	300637	259407
		0	11,67	19,32	15,49
7	Perhubungan	63752	87229	59326	70102
		0	36,83	-31,99	2,42
8	Keuangan	TT	TT	TT	TT
9	Jasa dan lainnya	150685	192458	238830	193991
		0	27,72	24,09	25,91
	Jumlah	1151705	1438064	1407686	
		0	24,86	-2,11	

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka Tahun 2007, 2008 dan 2009

Selanjutnya kalau kita cermati kemampuan perusahaan industri besar dan sedang di Kabupaten Malang untuk menyerap tenaga kerja dalam kurun waktu tahun 2006 sampai 2008, sebagaimana yang disajikan dalam tabel 9, maka lima besar industri yang dimaksud adalah: industri makanan dan minuman jumlahnya sekitar 87 unit dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 20.779 orang per tahun, industri Kimia, Minyak Bumi, Batu Bara, Karet, dan Plastik jumlahnya sekitar 22 unit dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 6.154 orang per tahun, industri barang dari logam, mesin dan alatnya jumlahnya sekitar 38 unit dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 3.623 orang per tahun, industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit jumlahnya sekitar 30 unit dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 3.347 orang per tahun, dan industri kertas dan barang dari

kertas jumlahnya sekitar 7 unit dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 2.058 orang per tahun.

Tabel 10
Perkembangan Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang
di Kabupaten Malang
Tahun 2006- 2008

No	Jenis Industri	Tahun						rata-rata	
		2006		2007		2008		P	TK
		P	TK	P	TK	P	TK		
1	Makanan, Minuman, Tembakau	68	19647	107	21025	86	21664	87	20779
	Tekstil,	40,72	50,20	40,53	55,56	40,19	56,07	40,47	53,92
2	Pakaian Jadi, dan Kulit	16	3728	43	3220	30	3094	30	3347
	Kayu, dan	9,58	9,53	16,29	8,51	14,02	8,01	13,80	8,69
3	Perabot Rumah	8	989	20	1990	16	1875	15	1618
	Tangga	4,79	2,53	7,58	5,26	7,48	4,85	6,82	4,20
	Kertas, dan								
4	Barang dari Kertas	8	3272	8	1452	6	1450	7	2058
	Kimia, M.Bumi,	4,79	8,36	3,03	3,84	2,80	3,75	3,41	5,34
5	B.Bara, Karet, dan Plastik	26	8205	21	5216	20	5042	22	6154
	Mineral bukan	15,57	20,97	7,95	13,78	9,35	13,05	10,39	15,97
6	Logam, Minyak, dan B.Bara	11	551	16	1142	15	1177	14	957
		6,59	1,41	6,06	3,02	7,01	3,05	6,51	2,48
7	Logam Dasar	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Barang dr								
8	Logam, Mesin dan alatnya	30	2743	46	3794	38	4333	38	3623
	Pengolahan	17,96	7,01	17,42	10,03	17,76	11,22	17,67	9,40
9	lainnya	0	0	3	0	3	0	2	0
		0,00	0,00	1,14	0,00	1,40	0,00	0,93	0,00

Jumlah	167	39135	264	37839	214	38635	215	38536
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka Tahun 2007, 2008 dan 2009

Kabupaten Bangkalan

Ditinjau dari perkembangan kontribusi masing-masing sektor atau lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangkalan dari tahun 2004 sampai 2008 atas dasar harga konstan tahun 2000, sebagaimana yang tersebut dalam tabel 11, didapat kecenderungan bahwa kontribusi sektor industri adalah sangat rendah, yakni hanya dengan rata-rata kontribusi 4,03% dan angka rata-rata pertumbuhan sekitar -1,42% per tahun atau berada di urutan ketujuh. Rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB, mengindikasikan bahwa prospek sektor industri di Kabupaten Bangkalan belum menjanjikan, sehingga warga masyarakatnya lebih suka beraktifitas atau menekuni sektor lain untuk mendapatkan penghasilan atau sebagai sumber mata pencahariannya.

Tabel 11
Perkembangan Peran Sektoral Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008 (Dalam Persen)

No.	Lapangan Usaha	Tahun					Rata-Rata
		2004	2005	2006	2007*)	2008**)	
1	Pertanian	38,03	37,06	36,19	34,80	35,61	36,34
		0,00	-2,55	-2,35	-3,84	2,33	-1,60
2	Perdagangan	24,72	24,75	24,41	25,12	25,15	24,83
		0,00	0,12	-1,37	2,91	0,12	0,44
3	Jasa dan lainnya	14,00	14,00	14,31	14,42	14,18	14,18
		0,00	0,00	2,21	0,77	-1,66	0,33
4	Perhubungan	7,45	7,64	7,82	7,76	7,57	7,65
		0,00	9,39	9,16	11,36	-0,78	7,28
5	Bangunan	4,79	5,24	5,72	6,37	6,32	5,69
		0,00	2,55	2,36	-0,77	-2,45	0,42
6	Keuangan	4,77	4,89	5,01	5,00	4,86	4,91
		0,00	2,52	2,45	-0,20	-2,80	0,49
7	Industri	4,09	4,10	4,09	4,00	3,86	4,03
		0,00	0,24	-0,24	-2,20	-3,50	-1,42
8	Pertambangan	1,44	1,56	1,62	1,71	1,66	1,60
		0,00	8,33	3,85	5,56	-2,92	3,70
9	Listrik	0,72	0,78	0,84	0,82	0,79	0,79
		0,00	8,33	7,69	-2,38	-3,66	2,50
Jumlah		100,01	100,02	100,01	100,00	100,00	100,01

Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka Tahun 2007:296, 2008:296, 2008:282

Dengan telah dioperasionalkannya jembatan Surabaya – Madura (SURAMADU), maka peluang Kabupaten Bangkalan untuk menjadi daerah pengembangan industri akan menjadi prospektif dan layak dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Indikasi akan semakin berkembangnya wilayah Bangkalan dapat kita cermati dari tingginya angka pertumbuhan rata-rata kontribusi sektor bangunan terhadap PDRB, yakni sekitar 7,28% per tahun atau paling tinggi diantara sektor lainnya. Tingginya angka pertumbuhan rata-rata sektor bangunan, oleh banyak pihak dikatakan sebagai dampak positif dari keberadaan jembatan Surabaya – Madura, dan rencana pengembangan wilayah SURAMADU sebagai kawasan industri, perumahan dan pelabuhan Peti Kemas.

Tabel 12
Perkembangan Kesempatan Kerja di Kabupaten Bangkalan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008

No.	lapangan usaha	Tahun					Rata-Rata
		2004	2005	2006	2007	2008	
1	Pertanian	239495	241565	243559	244413	228324	239471
		54,75	57,49	57,44	57,68	55,92	56,65
2	Jasa dan lainnya	40700	40626	41195	40079	60983	44717
		9,30	9,67	9,72	9,46	14,94	10,58
3	Perhubungan	48005	48202	48673	48500	19999	42676
		10,97	11,47	11,48	11,45	4,90	10,09
4	Keuangan	44092	43171	43554	43826	4869	35902
		10,08	10,27	10,27	10,34	1,19	8,49
5	Perdagangan	9288	9415	9511	9175	57820	19042
		2,12	2,24	2,24	2,17	14,16	4,50
6	Bangunan	17569	17834	17896	17959	14808	17213
		4,02	4,24	4,22	4,24	3,63	4,07
7	Industri	9445	9399	9499	9632	15822	10759
		2,16	2,24	2,24	2,27	3,88	2,55
8	Pertambangan	21443	2114	2137	2144	5397	6647
		4,90	0,50	0,50	0,51	1,32	1,57
9	Listrik	7434	7861	7992	8020	267	6315
		1,70	1,87	1,88	1,89	0,07	1,49
Jumlah		437471	420187	424016	423748	408289	422742
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka Tahun 2007, 2008 dan 2009

Tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, sebagaimana yang tertulis dalam tabel 11, ternyata ada kaitannya dengan kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Bangkalan. Sektor pertanian adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Bangkalan, yakni sekitar 239.471 orang per tahun atau sekitar 56,65% dari jumlah kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Bangkalan, dan sektor yang paling kecil menyerap tenaga kerja adalah sektor listrik. Tingginya kemampuan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja dan rendahnya kemampuan sektor industri dan listrik dalam menyerap tenaga kerja, mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Bangkalan adalah masih tinggal di daerah Pedesaan atau pesisir pantai yang kental dengan budaya hidup secara tradisional dan belum banyak terpengaruh oleh kemajuan teknologi modern.

Di masa depan dan/atau setelah Badan Pengembangan Wilayah SURAMADU melakukan kegiatan atau beroperasi secara efektif, kondisi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bangkalan ada kecenderungan akan terjadi kondisi yang sebaliknya, dimana sektor modern akan semakin berkembang dan kemampuan sektor industri dan listrik dalam menyerap tenaga kerja akan menjadi semakin dominan, mengingat Kabupaten Bangkalan masuk dalam zona atau wilayah pengembangan SURAMADU.

Tabel 13
Perkembangan Jumlah Perusahaan Industri dan Tenaga Kerja
di Kabupaten Bangkalan Menurut Skala Industri Tahun 2004-2008

No.	Tahun	Skala Industri						Jumlah	
		Besar/Sedang		Kecil		Rumah Tangga		P	TK
		P	TK	P	TK	P	TK		
1	2004	27	759	388	3303	16501	24390	16916	28452
		0,16	2,67	2,29	11,61	97,55	85,72	100,00	100,00
2	2005	45	1084	419	3505	16511	24470	16975	29059
		0,27	3,73	2,47	12,06	97,27	84,21	100,00	100,00
3	2006	60	1230	435	3620	16511	24470	17006	29320
		0,35	4,20	2,56	12,35	97,09	83,46	100,00	100,00
4	2007	60	1230	458	3735	16511	24470	17029	29435
		0,35	4,18	2,69	12,69	96,96	83,13	100,00	100,00
5	2008	62	1247	458	3784	16514	24495	17034	29526
		0,36	4,22	2,69	12,82	96,95	82,96	100,00	100,00
Rata-Rata		51	1110	432	3589	16510	24459	16992	29158
		0,30	3,81	2,54	12,31	97,16	83,88	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka Tahun 2007, 2008 dan 2009

Ditinjau dari perkembangan jumlah perusahaan industri dan tenaga kerja di Kabupaten Bangkalan dalam kurun waktu tahun 2004 sampai 2008, sekitar 97,16% atau 16.510 unit perusahaan industri adalah industri rumah tangga yang menyerap sekitar 83,88% atau 24.459 orang tenaga kerja pada sektor industri, diikuti oleh industri kecil sekitar 2,54% atau 432 unit usaha yang menyerap sekitar 12,31% tenaga kerja sector industri, dan industri besar/średang sekitar 0,30% atau 51 unit usaha yang menyerap sekitar 3,81% tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Bangkalan. Rendahnya perbandingan antara jumlah unit perusahaan industri rumah tangga dengan jumlah tenaga kerja yang diserap, yakni 16.510 : 24.459 atau 1:1,5 adalah merupakan ciri khas dari industri rumah tangga, yakni cenderung mempekerjakan anggota rumah tangga dan/atau mempekerjakan tenaga kerja yang jumlahnya kurang dari lima (5) orang.

SIMPULAN

Kondisi PDRB dari empat (4) Kabupaten yang dijadikan lokasi penelitian ini menunjukkan kondisi investasi atau industrialisasi sebagai berikut. *Pertama*, dilihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000, di satu sisi, semua PDRB di empat (4) Kabupaten atau lokasi penelitian ini menunjukkan kecenderungan bahwa kontribusi sektor industri kepada PDRB masih rendah, dan di sisi yang lain, semua PDRB menunjukkan kecenderungan bahwa sektor pertanian adalah sebagai penyumbang terbesar kepada PDRB di daerah tersebut. *Kedua*, pembangunan ekonomi yang telah dilakukan selama ini ternyata tidak sepenuhnya berkorelasi dengan penurunan jumlah pencari kerja yang diterima di sektor modern, hal ini tersirat dari masih relatif rendahnya jumlah tenaga kerja yang tertampung oleh lowongan kerja di sektor modern atau industri, contohnya: di Magetan baru 8,15 tenaga kerja yang bekerja di sektor industri, di Bangkalan hanya 2,55% tenaga kerja yang bekerja di sektor Industri. *Ketiga*, dominannya angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian di empat (4) kabupaten lokasi penelitian ini, mengindikasikan bahwa perlu adanya faktor pendorong pengembangan investasi dan/atau industrialisasi di daerah tersebut, misalnya: adanya komitmen elit, dukungan swasta dan masyarakat, dukungan regulasi, kesiapan lembaga, ketersediaan informasi potensi investasi, kemudahan perijinan, dukungan prasarana dan sarana, ketersediaan lahan kawasan industri, ketersediaan tenaga kerja dengan upah terjangkau, lokasi strategis, dan iklim investasi yang kondusif pada sektor pertanian. *Keempat*, relatif besarnya kontribusi sektor jasa pada semua PDRB Kabupaten yang dijadikan lokasi penelitian ini, mengindikasikan bahwa sektor jasa tersebut juga perlu dikembangkan guna mendukung gerakan investasi dan industrialisasi pada sektor pertanian. *Kelima*, relatif kecilnya kontribusi sektor industri dalam menyerap tenaga kerja di lokasi penelitian ini bisa diakibatkan oleh rendahnya kualitas tenaga kerja di daerah tersebut dan/atau adanya kecenderungan para pengusaha untuk melakukan penghematan biaya dan/atau meminimumkan resiko bisnisnya. *Keenam*, kebijakan investasi di masa lampau yang cenderung mengikuti keinginan pasar untuk meminimumkan biaya dan/atau keinginan

untuk meminimumkan resiko bisnis adalah satu diantara penyebab terbatasnya lowongan kerja di sektor modern, yang akhirnya berdampak pada terbatasnya lowongan kerja.

Saran

Sejalan dengan simpulan di depan, sejumlah pokok pikiran yang peneliti rekomendasikan sebagai berikut. *Pertama*, program peningkatan investasi dan/atau industrialisasi di Wilayah Jawa Timur pada umumnya, dan di empat (4) kabupaten atau lokasi penelitian ini pada khususnya perlu diorientasikan pada investasi dan/atau industrialisasi yang bisa menyerap tenaga kerja lokal, mengingat banyaknya rantai nilai yang akan ikut menikmati manfaat program tersebut dan besarnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian. *Kedua*, pengembangan investasi dan/atau industrialisasi di Jawa Timur pada umumnya dan di empat (4) kabupaten atau lokasi penelitian ini pada khususnya perlu diorientasikan pada pemanfaatan potensi dan/atau sumber daya lokal dan/atau tenaga kerja lokal, sehingga tidak muncul gejala seperti yang tersirat dalam peribahasa “Ayam bertelur di lumbung padi mati kelaparan”. *Ketiga*, untuk mendorong pengembangan investasi dan/atau industrialisasi di Jawa Timur dan di empat (4) kabupaten atau lokasi penelitian ini, diperlukan adanya: komitmen elit atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah empat (4) kabupaten atau lokasi penelitian ini, dukungan swasta dan masyarakat, dukungan regulasi, kesiapan lembaga, ketersediaan informasi potensi investasi, kemudahan perijinan, dukungan prasarana dan sarana, ketersediaan lahan kawasan industri, ketersediaan tenaga kerja dengan upah terjangkau, lokasi strategis, dan iklim investasi yang kondusif pada sektor pertanian. *Keempat*, untuk meningkatkan potensi pasar dan/atau untuk mendukung gerakan investasi dan industrialisasi pada sektor pertanian, adalah sangat bijak bila sektor jasa seperti jasa pariwisata juga dikembangkan, mengingat kunjungan wisata sangat berpotensi ikut mempromosikan produk dari daerah tempat tujuan pariwisata, disamping menambah devisa dari kunjungan wisatawan. *Kelima*, untuk meningkatkan motivasi para pengusaha untuk merekrut tenaga kerja lokal, maka Pemerintah Daerah setempat perlu secara serius untuk memprogramkan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di daerahnya, dan juga perlu secara serius memotivasi para investor di daerahnya agar mau mengorientasikan bisnisnya pada aspek sosial-ekonomi dan bukan pada aspek ekonomi semata. *Keenam*, agar para investor mau menggunakan tenaga kerja lokal, kebijakan yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Daerah adalah dengan merumuskan kebijakan yang mampu meminimumkan biaya sosial yang ditanggung oleh investor, dan memfasilitasi kebutuhan investor dalam merealisasikan rencana bisnisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS). 2009. *Statistik Ketenagakerjaan Indonesia 2006-2008*, Jakarta.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan. 2008. *Kabupaten Magetan Dalam Angka Tahun 2007*. Magetan.
- . 2009. *Kabupaten Magetan Dalam Angka Tahun 2008*. Magetan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. 2008. *Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka Tahun 2007*. Bojonegoro.
- . 2009. *Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka Tahun 2008*. Bojonegoro.
- . 2010. *Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka Tahun 2009*. Bojonegoro.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. 2008. *Kabupaten Malang Dalam Angka Tahun 2007*, Malang.
- . 2009. *Kabupaten Malang Dalam Angka Tahun 2008*, Malang.
- , 2010, *Kabupaten Malang Dalam Angka Tahun 2010*. Malang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan. 2008. *Kabupaten Bangkalan Dalam Angka Tahun 2007*. Bangkalan.
- . 2009. *Kabupaten Bangkalan Dalam Angka Tahun 2008*. Bangkalan.
- . 2010. *Kabupaten Bangkalan Dalam Angka Tahun 2009*. Bangkalan.
- Bank Indoneia. 2008. *Peran Remitansi TKI dalam Inflasi & Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Timur*. Laporan Hasil Kajian, kerjasama Bank Indonesia Surabaya dengan Center for Integrated Community Learning and Empowerment, Surabaya.
- Haryati, E. 2007. Evaluasi Rancangan Kebijakan Kerjasama Kemitraan Antara Sekolah di Perkotaan dengan Sekolah di Pedesaan di Provinsi Jawa Timur, *ASPIRASI, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. XVII, No. 3, Oktober 2007*.
- . 2009. *Remitansi Tenaga Kerja Indonesia: Dampaknya terhadap Inflasi dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*, *EKUITAS, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 13, No. 3 – September 2009*.
- Maliki, Z. 2009. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal, *LITERASI: Jurnal Reformasi Pendidikan, Vol I No 2, Juli 2009, ISSN : 2085-4641*.

- Koesworo. 2008. *Kewirausahaan: Konsep dan Implementasi*, Materi Pelatihan Kewirausahaan, Center for Integrated Community Learning and Empowerment, Surabaya.
- Sobandi, B. 2003. Pengembangan Model Kebijakan Alokasi Anggaran Daerah Berorientasi Keadilan dan Pertumbuhan Ekonomi, *WACANA KINERJA: Jurnal Kajian Praktis-Akademis Kinerja Kebijakan dan Administrasi Pelayanan Publik*, Volume 6 Nomor 4, Desember 2003, ISSN 1411-4917.
- Sumarsono. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Wardhono, H. 2008. *Analisis dan Evaluasi Pengembangan Usaha Pengadaan Pangan Koperasi dalam Sistem Bank Padi*, Laporan Penelitian, Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur, Tidak Dipublikasikan, Surabaya.
- . 2008a. Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan terhadap Rumah Tangga Nelayan di Desa Tasik Madu Kecamatan Watu Limo Kabupaten Trenggalek, *ASPIRASI: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. XVIII Nomor 2, Desember 2008.
- Wirjokusumo, I. 2003. Competency-Based Teacher Development. *Jurnal Teknologi Pembelajaran: Teori dan Penelitian*, Tahun 11, Nomor 2, Oktober 2003.